



# **BUPATI LUWU TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH  
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
  - b. bahwa tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 29);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 44);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN  
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DALAM WILAYAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur;
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dalam melakukan proses penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Luwu Timur;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan mendapat pendelegasian kewenangan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
11. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
12. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;

14. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
16. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan atas kegiatan usahanya;
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya;
20. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita;

## BAB II

### PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usaha atau objek pajak kepada Bupati Luwu Timur dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usaha.
- (2) Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan kegiatan usahanya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan.

### Pasal 3

Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan sebagai berikut :

- a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, dengan melampirkan :
  1. fotocopy KTP pengusaha/penanggung jawab/kuasanya;
  2. fotocopy surat keterangan domisili tempat usaha;
  3. fotocopy SIUP;
  4. fotocopy Akta Perusahaan; dan
  5. fotocopy Izin Gangguan.
- c. Terhadap penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah memberikan tanda terima.

### BAB III

#### PENERBITAN NPWPD

### Pasal 4

- (1) Berdasarkan data yang disampaikan wajib pajak, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, menerbitkan :
  - a. Surat Pengukuhan sebagai wajib pajak dengan sistem pemungutan pajak yang digunakan;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah; dan
  - c. Maklumat.
- (2) Setiap wajib pajak daerah hanya memiliki satu NPWPD.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b ditetapkan berdasarkan lokasi, jenis pajak, kegiatan usaha, dan register pendaftaran yang terdiri dari 12 (dua belas) digit sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terhadap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha lebih dari satu kegiatan usaha pemberian NPWPD berdasarkan kegiatan usaha yang terdaftar.
- (5) Penyerahan Surat Pengukuhan, NPWPD dan maklumat kepada pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima.
- (6) Terhadap maklumat, wajib pajak wajib memasang ditempat yang mudah dilihat.

Pasal 5

Penerbitan NPWPD secara jabatan dilakukan apabila Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD, namun tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftar.

BAB IV  
FUNGSI NPWPD

Pasal 6

NPWPD yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, berfungsi :

1. Sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak;
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak daerah dan dalam pengawasan administrasi perpajakan;
3. Dicantumkan di dalam setiap dokumen perpajakan;

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

| STEMPEL PARAF KOORDINASI                                                   |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN<br>DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR |                                                                                     |
| TELAH DIPERIKSA                                                            | PARAF                                                                               |
| SEKDA                                                                      |  |
| ASISTEN                                                                    |  |
| KADIS                                                                      |  |
| KABID <i>Pendapatan</i>                                                    |  |
| KASUBAG / KASUB                                                            |                                                                                     |

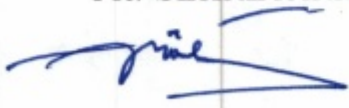
Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal, 02 Januari 2012

BUPATI LUWU TIMUR,

  
ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili  
pada tanggal, 02 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

  
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENERBITAN  
 NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DALAM WILAYAH  
 KABUPATEN LUWU TIMUR

| KECAMATAN | KODE | DESA          | KODE | OBJEK PAJAK                        | KODE | KEGIATAN USAHA                         | KODE | NO.<br>REGISTER |
|-----------|------|---------------|------|------------------------------------|------|----------------------------------------|------|-----------------|
| 1         | 2    | 3             | 4    | 5                                  | 6    | 7                                      | 8    | 9               |
| BURAU     | 01   | Lewonu        | 01   | PAJAK HOTEL                        | 01   | Hotel                                  | 01   |                 |
|           |      | Lambarese     | 02   |                                    |      | Penginapan                             | 02   |                 |
|           |      | Mabonta       | 03   |                                    |      | Wisma                                  | 03   |                 |
|           |      | Lauwo         | 04   |                                    |      | Rumah Kos                              | 04   |                 |
|           |      | Bonepute      | 05   |                                    |      | dst                                    |      |                 |
|           |      | Lumbewe       | 06   | PAJAK RESTORAN                     | 02   | Restoran                               | 01   |                 |
|           |      | Laro          | 07   |                                    |      | Rumah Makan                            | 02   |                 |
|           |      | Cendana       | 08   |                                    |      | Catering                               | 03   |                 |
|           |      | Lagego        | 09   |                                    |      | dst                                    |      |                 |
|           |      | Benteng       | 10   |                                    |      |                                        |      |                 |
|           |      | Batu Putih    | 11   | PAJAK REKLAME                      | 03   | Reklame                                | 01   |                 |
|           |      | Lanosi        | 12   |                                    |      | dst                                    |      |                 |
|           |      | Burau Pantai  | 13   |                                    |      |                                        |      |                 |
|           |      | Burau         | 14   | PAJAK HIBURAN                      | 04   | Tontonan Film                          | 01   |                 |
|           |      | Jalajja       | 15   |                                    |      | Diskotik, Karaoke, Klab Malam          | 02   |                 |
| WOTU      | 02   | dst           |      |                                    |      | Permainan Bilyar, Golf, dan Boling     | 03   |                 |
|           |      | Bawalipu      | 01   |                                    |      | dst                                    |      |                 |
|           |      | Maramba       | 02   |                                    |      |                                        |      |                 |
|           |      | Kanawatu      | 03   | PAJAK PENERANGAN JALAN             | 05   | PT. PLN                                | 01   |                 |
|           |      | Tarengge      | 04   |                                    |      | Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri | 02   |                 |
|           |      | Cendana Hijau | 05   |                                    |      | dst                                    |      |                 |
|           |      | Kalaena       | 06   |                                    |      |                                        |      |                 |
|           |      | Lera          | 07   | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM & BATUAN | 06   | Perseroan Terbatas (PT)                | 01   |                 |
|           |      | Karambua      | 08   |                                    |      | Commanditaire Venootschap (CV)         | 02   |                 |
|           |      | Bahari        | 09   |                                    |      | Perorangan                             | 03   |                 |
|           |      | Balo-Balo     | 10   |                                    |      | dst                                    |      |                 |
|           |      | Pepuro Barat  | 11   |                                    |      |                                        |      |                 |
|           |      | Lampenai      | 12   | PAJAK AIR TANAH                    | 07   |                                        |      |                 |

| KECAMATAN    | KODE | DESA                | KODE | OBJEK PAJAK | KODE | KEGIATAN USAHA             | KODE | NO.<br>REGISTER |
|--------------|------|---------------------|------|-------------|------|----------------------------|------|-----------------|
| 1            | 2    | 3                   | 4    | 5           | 6    | 7                          | 8    | 9               |
| TOMONI       | 03   | dst                 |      |             |      | Perusahaan                 | 01   |                 |
|              |      |                     |      |             |      | Hotel                      | 02   |                 |
|              |      | Kalpataru           | 01   |             |      | Penginapan                 | 03   |                 |
|              |      |                     |      |             |      | Usaha Cuci Mobil dan Motor | 04   |                 |
| TOMONI TIMUR | 04   | Bayondo             | 02   |             |      | dst                        |      |                 |
|              |      | Mulyasri            | 03   |             |      |                            |      |                 |
|              |      | Lestari             | 04   |             |      |                            |      |                 |
|              |      | Beringin Jaya       | 05   |             |      |                            |      |                 |
|              |      | Tadulako            | 06   |             |      |                            |      |                 |
|              |      | Ujung Baru          | 07   |             |      |                            |      |                 |
|              |      | Sumber Alam         | 08   |             |      |                            |      |                 |
|              |      | Bangun Jaya         | 09   |             |      |                            |      |                 |
|              |      | Bangun Karya        | 10   |             |      |                            |      |                 |
|              |      | Mandiri             | 11   |             |      |                            |      |                 |
|              |      | Tomoni              | 12   |             |      |                            |      |                 |
|              |      | dst                 |      |             |      |                            |      |                 |
|              |      | Pattengko           | 01   |             |      |                            |      |                 |
|              |      | Purwosari           | 02   |             |      |                            |      |                 |
|              |      | Kertoraharjo        | 03   |             |      |                            |      |                 |
|              |      | Cendana Hitam       | 04   |             |      |                            |      |                 |
| MANGKUTANA   | 05   | Manunggal           | 05   |             |      |                            |      |                 |
|              |      | Margo Mulyo         | 06   |             |      |                            |      |                 |
|              |      | Alam Buana          | 07   |             |      |                            |      |                 |
|              |      | Cendana Hitam Timur | 08   |             |      |                            |      |                 |
|              |      | dst                 |      |             |      |                            |      |                 |
|              |      | Panca Karsa         | 01   |             |      |                            |      |                 |
|              |      | Maleku              | 02   |             |      |                            |      |                 |
|              |      | Margolembo          | 03   |             |      |                            |      |                 |
|              |      | Tiromu              | 04   |             |      |                            |      |                 |
|              |      | Kasintuwu           | 05   |             |      |                            |      |                 |
| KALAENA      | 06   | Manggala            | 06   |             |      |                            |      |                 |
|              |      | Balai Kembang       | 07   |             |      |                            |      |                 |
|              |      | Wonorejo            | 08   |             |      |                            |      |                 |
|              |      | dst                 |      |             |      |                            |      |                 |
|              |      | Argo Mulyo          | 01   |             |      |                            |      |                 |

| KECAMATAN | KODE | DESA            | KODE | OBJEK PAJAK | KODE | KEGIATAN USAHA | KODE | NO.<br>REGISTER |
|-----------|------|-----------------|------|-------------|------|----------------|------|-----------------|
| 1         | 2    | 3               | 4    | 5           | 6    | 7              | 8    | 9               |
|           |      | Sumber Agung    | 02   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Kalaena Kiri    | 03   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Partasi Kencana | 04   |             |      |                |      |                 |
|           |      |                 |      |             |      |                |      |                 |
| ANGKONA   | 07   | Non Blok<br>dst | 05   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Tawakua         | 01   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Manta Dulu      | 02   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Taripa          | 03   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Maliwowo        | 04   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Lamaeto         | 05   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Balirejo        | 06   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Tampinna        | 07   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Solo            | 08   |             |      |                |      |                 |
|           |      | dst             |      |             |      |                |      |                 |
| MALILI    | 08   | Harapan         | 01   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Laskap          | 02   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Wewangriu       | 03   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Baruga          | 04   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Manurung        | 05   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Lakawali        | 06   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Balantang       | 07   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Tarabbi         | 08   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Ussu            | 09   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Pongkeru        | 10   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Atue            | 11   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Puncak Indah    | 12   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Malili          | 13   |             |      |                |      |                 |
|           |      | dst             |      |             |      |                |      |                 |
| WASUPONDA | 09   | Tabarano        | 01   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Parumpanai      | 02   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Balambano       | 03   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Ledu-Ledu       | 04   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Kawata          | 05   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Wasuponda       | 06   |             |      |                |      |                 |

| KECAMATAN | KODE | DESA         | KODE | OBJEK PAJAK | KODE | KEGIATAN USAHA | KODE | NO.<br>REGISTER |
|-----------|------|--------------|------|-------------|------|----------------|------|-----------------|
| 1         | 2    | 3            | 4    | 5           | 6    | 7              | 8    | 9               |
| NUHA      | 10   | dst          |      |             |      |                |      |                 |
|           |      | Magani       | 01   |             |      |                |      |                 |
| TOWUTI    | 11   | Matano       | 02   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Nuha         | 03   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Nikkel       | 04   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Sorowako     | 05   |             |      |                |      |                 |
|           |      | dst          |      |             |      |                |      |                 |
|           |      | Asuli        | 01   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Langkea Raya | 02   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Baruga       | 03   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Lioka        | 04   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Timampu      | 05   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Pekaloa      | 06   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Mahalona     | 07   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Loeha        | 08   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Tokalimbo    | 09   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Bantilang    | 10   |             |      |                |      |                 |
|           |      | Wawondula    | 11   |             |      |                |      |                 |
|           |      | dst          |      |             |      |                |      |                 |

**STEMPEL PARAF KOORDINASI**  
**DINAS PERKAMPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR**

| TELAH DIPERIKSA         | PARAF                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDA                   |  |
| ASISTEN                 |  |
| KADIS                   |  |
| KABID <i>Pendapatan</i> |  |
| KASUBAG / KASI          |                                                                                       |

BUPATI LUWU TIMUR,

  
**ANDI HATTA M.**

**TAHUN 2004**

| <b>TANGGAL</b>   | <b>NO. PERDA</b> | <b>PERDA TENTANG</b>                                                 | <b>INSTANSI</b> | <b>TLD</b> | <b>STATUS</b> |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| 02 DESEMBER 2004 | 01 TAHUN 2004    | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004 | BAGIAN KEUANGAN |            |               |

**TAHUN 2005**

| <b>TANGGAL</b>   | <b>NO. PERDA</b> | <b>PERDA TENTANG</b>                                                                                       | <b>INSTANSI</b>                | <b>TLD</b> | <b>STATUS</b>                                                                             |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 JANUARI 2005  | 03 TAHUN 2005    | POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR                                             | BAGIAN KEUANGAN                |            | DICABUT DGN PERDA NO 9 THN 2007 DICABUT DGN PERDA NO 5 THN 2009                           |
| 14 JANUARI 2005  | 04 TAHUN 2005    | KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |            | DIUBAH DGN PERDA NO 2 THN 2006, DIUBAH PERDA NO 1 THN 2007 DIUBAH DGN PERDA NO 7 THN 2007 |
| 14 JANUARI 2005  | 05 TAHUN 2005    | PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH                                                            | DINAS PENDAPATAN DAERAH        |            | DICABUT DGN PERDA NO 39 THN 2011                                                          |
| 17 FEBRUARI 2005 | 06 TAHUN 2005    | PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C                                                                  | DINAS PENDAPATAN DAERAH        | 1          | DICABUT DGN PERDA NO 7 THN 2010                                                           |
| 17 FEBRUARI 2005 | 07 TAHUN 2005    | PAJAK PENERANGAN JALAN                                                                                     | DINAS PENDAPATAN DAERAH        | 2          | DICABUT DGN PERDA NO 15 THN 2011                                                          |

|                  |               |                                    |                               |    |                                                                            |
|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 17 FEBRUARI 2005 | 08 TAHUN 2005 | PAJAK HOTEL                        | DINAS<br>PENDAPATAN<br>DAERAH | 3  | DICABUT DGN PERDA NO<br>5 THN 2010                                         |
| 17 FEBRUARI 2005 | 9 TAHUN 2005  | PAJAK RESTORAN                     | DINAS<br>PENDAPATAN<br>DAERAH | 4  | DICABUT DGN PERDA NO<br>6 THN 2010                                         |
| 17 FEBRUARI 2005 | 10 TAHUN 2005 | PAJAK HIBURAN                      | DINAS<br>PENDAPATAN<br>DAERAH | 5  | DICABUT DGN PERDA NO<br>3 THN 2011                                         |
| 17 FEBRUARI 2005 | 11 TAHUN 2005 | PAJAK REKLAME                      | DINAS<br>PENDAPATAN<br>DAERAH | 6  | DIUBAH DGN PERDA NO<br>10 THN 2009, DICABUT<br>DGN PERDA NO 4 THN<br>2011  |
| 17 FEBRUARI 2005 | 12 TAHUN 2005 | RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN | DINAS<br>PENDAPATAN<br>DAERAH | 7  | DICABUT DGN PERDA NO<br>6 THN 2011                                         |
| 17 FEBRUARI 2005 | 13 TAHUN 2005 | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN      | DINAS<br>PENDAPATAN<br>DAERAH | 8  | DICABUT DGN PERDA NO<br>13 THN 2009, DICABUT<br>DGN PERDA NO 1 THN<br>2011 |
| 17 FEBRUARI 2005 | 14 TAHUN 2005 | RETRIBUSI PASAR                    | DINAS<br>PENDAPATAN<br>DAERAH | 9  | DIUBAH DGN PERDA NO<br>3 THN 2009, DICABUT<br>DGN PERDA NO 13 THN<br>2011  |
| 17 FEBRUARI 2005 | 15 TAHUN 2005 | RETRIBUSI IZIN GANGGUAN            | DINAS<br>PENDAPATAN<br>DAERAH | 10 | DICABUT DGN PERDA NO<br>8 THN 2010                                         |
| 17 FEBRUARI 2005 | 16 TAHUN 2005 | RETRIBUSI TERMINAL                 | DINAS<br>PENDAPATAN<br>DAERAH | 11 | DICABUT DGN PERDA NO<br>30 THN 2011                                        |
| 17 FEBRUARI 2005 | 17 TAHUN 2005 | RETRIBUSI IZIN TRAYEK              | DINAS<br>PENDAPATAN<br>DAERAH | 12 | DICABUT DGN PERDA NO<br>32 THN 2011                                        |

|                   |               |                                                                                 |                         |    |                                                                   |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| 17 FEBRUARI 2005  | 18 TAHUN 2005 | RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR                                          | DINAS PENDAPATAN DAERAH | 13 | DICABUT DGN PERDA NO 31 THN 2011                                  |
| 17 FEBRUARI 2005  | 19 TAHUN 2005 | RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN                                                    | DINAS PENDAPATAN DAERAH | 14 | DICABUT DGN PERDA NO 18 THN 2011                                  |
| 17 FEBRUARI 2005  | 20 TAHUN 2005 | RETRIBUSI USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                                   | DINAS PENDAPATAN DAERAH | 15 |                                                                   |
| 17 FEBRUARI 2005  | 21 TAHUN 2005 | RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN                                       | DINAS PENDAPATAN DAERAH | 16 | DICABUT DGN PERDA NO 20 THN 2011                                  |
| 17 FEBRUARI 2005  | 22 TAHUN 2005 | RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH                                             | DINAS PENDAPATAN DAERAH | 17 | DIUBAH DGN PERDA NO 12 THN 2009, DICABUT DGN PERDA NO 19 THN 2011 |
| 19 MARET 2005     | 23 TAHUN 2005 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2005 | BAGIAN KEUANGAN         |    |                                                                   |
| 03 SEPTEMBER 2005 | 24 TAHUN 2005 | PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004          | BAGIAN KEUANGAN         |    |                                                                   |

#### TAHUN 2006

| TANGGAL         | NO. PERDA     | PERIHAL                                                                                                                                                                | INSTANSI        | TLD | STATUS                                                         |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| 14 JANUARI 2006 | 02 TAHUN 2006 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BAGIAN KEUANGAN | 18  | DIUBAH DGN PERDA NO 1 THN 2007, DIUBAH DGN PERDA NO 7 THN 2007 |

|                   |               |                                                                                           |                 |  |                                 |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|---------------------------------|
| 14 JANUARI 2006   | 03 TAHUN 2006 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2006           | BAGIAN KEUANGAN |  |                                 |
| 24 APRIL 2006     | 05 TAHUN 2006 | BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK                                                    | KESBANG         |  | DICABUT DGN PERDA NO 9 THN 2011 |
| 16 AGUSTUS 2006   | 10 TAHUN 2006 | PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005 | BAGIAN KEUANGAN |  |                                 |
| 24 AGUSTUS 2006   | 12 TAHUN 2006 | RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH                                                      | PERTAMBANGAN    |  |                                 |
| 24 AGUSTUS 2006   | 13 TAHUN 2006 | RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI                                                      | PU              |  |                                 |
| 24 AGUSTUS 2006   | 15 TAHUN 2006 | RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA                                                 | KESEHATAN       |  |                                 |
| 28 SEPTEMBER 2006 | 17 TAHUN 2006 | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006                      | BAGIAN KEUANGAN |  |                                 |
| 30 DESEMBER 2006  | 34 TAHUN 2006 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007           | BAG. KEUANGAN   |  |                                 |

#### TAHUN 2007

| TANGGAL         | NO. PERDA     | PERIHAL                                                                                                                                                                      | INSTANSI | TLD | STATUS                         |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------|
| 03 JANUARI 2007 | 01 TAHUN 2007 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BPKAD    | 19  | DIUBAH DGN PERDA NO 7 THN 2007 |

|                   |               |                                                                                                                                                               |       |    |                                 |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------|
| 10 JULI 2007      | 07 TAHUN 2007 | PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 04 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR | BPKAD | 20 |                                 |
| 29 AGUSTUS 2007   | 08 TAHUN 2007 | PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006                                                                     | BPKAD |    |                                 |
| 10 SEPTEMBER 2007 | 09 TAHUN 2007 | POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR                                                                                                | BPKAD | 21 | DICABUT DGN PERDA NO 5 THN 2009 |
| 23 OKTOBER 2007   | 11 TAHUN 2007 | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007                                                                     | BPKAD |    |                                 |
| 31 DESEMBER 2007  | 12 TAHUN 2007 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2008                                                                               | BPKAD |    |                                 |

#### TAHUN 2008

| TANGGAL          | NO. PERDA     | PERIHAL                                                                                   | INSTANSI | TLD | STATUS |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|
| 04 AGUSTUS 2008  | 11 TAHUN 2008 | PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                           | DPPKAD   |     |        |
| 05 DESEMBER 2008 | 12 TAHUN 2008 | PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 | DPPKAD   |     |        |
| 11 DESEMBER 2008 | 13 TAHUN 2008 | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2008 | DPPKAD   |     |        |

**TAHUN 2009**

| TANGGAL          | NO. PERDA     | PERIHAL                                                                                                              | INSTANSI                 | TLD | STATUS                           |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----------------------------------|
| 23 FEBRUARI 2009 | 01 TAHUN 2009 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009                                      | DPPKAD                   |     |                                  |
| 23 MARET 2009    | 03 TAHUN 2009 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR                     | DPPKAD                   |     | DICABUT DGN PERDA NO 13 THN 2011 |
| 23 MARET 2009    | 04 TAHUN 2009 | PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PT. BANK SULSEL                                                | DPPKAD                   |     |                                  |
| 10 AGUSTUS 2009  | 05 TAHUN 2009 | POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR                                                              | DPPKAD                   | 23  |                                  |
| 10 AGUSTUS 2009  | 06 TAHUN 2009 | TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH                                                                                       | DPPKAD                   |     |                                  |
| 27 AGUSTUS 2009  | 10 TAHUN 2009 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME                       | DPPKAD                   |     | DICABUT DGN PERDA NO 4 THN 2011  |
| 27 AGUSTUS 2009  | 12 TAHUN 2009 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH | DPPKAD                   |     | DICABUT DGN PERDA NO 19 THN 2011 |
| 27 AGUSTUS 2009  | 13 TAHUN 2009 | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN                                                                                        | DINAS KESEHATAN DAN RSUD |     | DICABUT DGN PERDA NO 1 THN 2011  |

|                  |               |                                                                                           |        |  |  |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| 04 DESEMBER 2009 | 14 TAHUN 2009 | PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 | DPPKAD |  |  |
| 10 DESEMBER 2009 | 15 TAHUN 2009 | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009 | DPPKAD |  |  |
| 31 DESEMBER 2009 | 16 TAHUN 2009 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010           | DPPKAD |  |  |

#### TAHUN 2010

| TANGGAL           | NO. PERDA     | PERIHAL                                                                                                        | INSTANSI | TLD | STATUS                         |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------|
| 20 SEPTEMBER 2010 | 02 TAHUN 2010 | PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM                            | PDAM     | 27  | DIUBAH DGN PERDA NO 1 THN 2012 |
| 23 SEPTEMBER 2010 | 04 TAHUN 2010 | PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009 | DPPKAD   |     |                                |
| 08 OKTOBER 2010   | 05 TAHUN 2010 | PAJAK HOTEL                                                                                                    | DPPKAD   | 28  |                                |
| 08 OKTOBER 2010   | 06 TAHUN 2010 | PAJAK RESTORAN                                                                                                 | DPPKAD   | 29  |                                |
| 08 OKTOBER 2010   | 07 TAHUN 2010 | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN                                                                           | DPPKAD   | 30  |                                |
| 08 OKTOBER 2010   | 08 TAHUN 2010 | RETRIBUSI IZIN GANGGUAN                                                                                        | DPPKAD   | 31  |                                |

|                  |               |                                                                                           |        |  |  |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| 18 OKTOBER 2010  | 09 TAHUN 2010 | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010 | DPPKAD |  |  |
| 30 DESEMBER 2010 | 16 TAHUN 2010 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011           | DPPKAD |  |  |

# TAHUN 2011

| TANGGAL          | NO. PERDA     | PERIHAL                                   | INSTANSI | TLD | STATUS                         |
|------------------|---------------|-------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------|
| 23 FEBRUARI 2011 | 01 TAHUN 2011 | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN             | RSUD     | 32  |                                |
| 23 FEBRUARI 2011 | 02 TAHUN 2011 | PAJAK AIR TANAH                           | DPPKAD   | 33  |                                |
| 23 FEBRUARI 2011 | 03 TAHUN 2011 | PAJAK HIBURAN                             | DPPKAD   | 34  |                                |
| 23 FEBRUARI 2011 | 04 TAHUN 2011 | PAJAK REKLAME                             | DPPKAD   | 35  |                                |
| 23 FEBRUARI 2011 | 05 TAHUN 2011 | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN | DPPKAD   | 36  |                                |
| 23 FEBRUARI 2011 | 06 TAHUN 2011 | RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN        | DPPKAD   | 37  | DIUBAH DGN PERDA NO 1 THN 2012 |

|                 |               |                                                                                                                     |           |    |  |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
| 26 MEI 2011     | 08 TAHUN 2011 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA PT. BANK SULAWESI SELATAN                        | DPPKAD    |    |  |
| 26 MEI 2011     | 09 TAHUN 2011 | PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK | KESBANG   |    |  |
| 01 AGUSTUS 2011 | 13 TAHUN 2011 | RETRIBUSI PELAYANAN PASAR                                                                                           | DPPKAD    | 42 |  |
| 01 AGUSTUS 2011 | 14 TAHUN 2011 | RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL                                       | CAPIL     | 43 |  |
| 01 AGUSTUS 2011 | 15 TAHUN 2011 | PAJAK PENERANGAN JALAN                                                                                              | DPPKAD    | 44 |  |
| 01 AGUSTUS 2011 | 16 TAHUN 2011 | RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH                                                                           | DPPKAD    | 45 |  |
| 18 AGUSTUS 2011 | 17 TAHUN 2011 | PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010  | DPPKAD    |    |  |
| 19 AGUSTUS 2011 | 18 TAHUN 2011 | RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN                                                                                        | PERTANIAN |    |  |
| 19 AGUSTUS 2011 | 19 TAHUN 2011 | RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH                                                                                 | DPPKAD    | 46 |  |
| 19 AGUSTUS 2011 | 20 TAHUN 2011 | RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN                                                                                         | PERIKANAN | 47 |  |
| 31 OKTOBER 2011 | 21 TAHUN 2011 | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011                                                | DPPKAD    |    |  |

|                  |               |                                                 |               |    |  |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|----|--|
| 31 DESEMBER 2011 | 29 TAHUN 2011 | ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2012   | DPPKAD        |    |  |
| 31 DESEMBER 2011 | 30 TAHUN 2011 | RETRIBUSI TERMINAL                              | DISHUBKOMINFO | 54 |  |
| 31 DESEMBER 2011 | 31 TAHUN 2011 | RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR          | DISHUBKOMINFO | 55 |  |
| 31 DESEMBER 2011 | 32 TAHUN 2011 | RETRIBUSI IZIN TRAYEK                           | DISHUBKOMINFO | 56 |  |
| 31 DESEMBER 2011 | 33 TAHUN 2011 | RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKSI     | DISHUBKOMINFO | 57 |  |
| 31 DESEMBER 2011 | 39 TAHUN 2011 | PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH | DPPKAD        | 59 |  |

#### TAHUN 2012

| TANGGAL      | NO. PERDA     | PERIHAL                                                                                                                                                             | INSTANSI | TLD | STATUS |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|
| 18 JUNI 2012 | 03 TAHUN 2012 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM | DPPKAD   | 65  |        |
| 02 JULI 2012 | 04 TAHUN 2012 | PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011                                                                  | DPPKAD   |     | X      |

|                   |               |                                                                                                                          |        |    |   |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---|
| 10 AGUSTUS 2012   | 06 TAHUN 2012 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU<br>TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN<br>MENDIRIKAN BANGUNAN | TARKIM | 67 |   |
| 26 SEPTEMBER 2012 | 07 TAHUN 2012 | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA<br>DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR                                                 | DPPKAD |    | X |
|                   |               |                                                                                                                          |        |    |   |
|                   |               |                                                                                                                          |        |    |   |